

## DINAMIKA

## Kepercayaan konsumen turun

JAKARTA: Kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia dalam 6 bulan mendatang turun akibat peningkatan harga pangan.

Hal tersebut terungkap dalam hasil survei indeks kepercayaan konsumen (IKK) Februari 2011 yang dilakukan oleh Danareksa Research Institute. Indeks tercatat turun sebesar 3% menjadi 79,8 setelah mengalami pelemahan 2,3% pada Januari.

Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan secara keseluruhan, sekitar 77,6% konsumen yang disurvei pada Februari khawatir terhadap harga pangan.

"Kedua komponen utama yang membentuk IKK menurun pada Februari," katanya, kemarin. (BISNIS/ACA)

## Regulator bantu perkapalan

JAKARTA: Pemerintah akan mempermudah akses pendanaan bagi pemilik kapal angkutan barang untuk menambah jumlah armada kapalannya.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedi S. Priatna mengatakan penyikapan fiskal tersebut dilakukan untuk mengurai masalah antrean truk di pelabuhan penyeberangan Merak-Bakahuni akibat minimnya jumlah kapal angkutan barang yang beroperasi.

"Untuk pendanaan, sistem pendanaan untuk kapal sekarang agak sulit. Jadi supaya pendanaan dari bank mudah. Itu skemanya akan dibuat oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan," katanya di Jakarta, kemarin. (BISNIS/ACA)

## Rencana induk pembangunan perlu ditinjau

OLEH AHMAD ARIS  
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Komite Ekonomi Nasional (KEN) menilai pemerintah perlu meninjau kembali konsep Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi pada 2011-2025 terutama dalam hal pembangunan enam koridor ekonomi.

Sekretaris KEN Aviliani mengatakan pemerintah selama ini cenderung memaksakan pembangunan infrastruktur yang dikehendaki, tanpa mempertimbangkan potensi aktivitas ekonomi yang bisa digarap di daerah tersebut.

"Seharusnya bangun dulu aktivitas ekonominya baru kemudian bangun sarana dan prasarana infrastrukturnya," katanya di Jakarta, kemarin.

Dia memberi contoh pembangunan jembatan Surabaya-Madura yang sama sekali tidak mempertimbangkan potensi ekonomi di kawasan sekitarnya.

Aviliani melanjutkan dalam pembangunan koridor ekonomi sebaiknya pemerintah memberikan kesempatan bagi swasta untuk menentukan potensi ekonomi apa yang ingin dikembangkan dalam suatu kawasan.

"Jangan hanya mengincar keterhubungan antarwilayah saja, tetapi konsep koridor yang dihubungkan dengan pengembangan infrastruktur. Idealnya untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah, jangan infrastruktur dulu baru perekonomian, itu terbalik," tegasnya.

Pemerintah dalam Ren-

cana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan berencana membangun enam koridor ekonomi yaitu koridor Sumatera dan Jawa berupa pelabuhan, rel kereta, dan pembangkit listrik.

Adapun, untuk koridor Kalimantan berupa pelabuhan sungai, rel kereta dan jalan tol. Koridor Sulawesi berupa irigasi, fasilitas pelabuhan dan listrik. Untuk koridor Bali—NTT dibutuhkan pelabuhan, bandara, jalan, dan pembangkit listrik. Sementara itu, infrastruktur untuk koridor Papua-Maluku berupa pelabuhan, jalan, dan listrik.

## Bantu ekonomi

Pemerintah yakin penyusunan enam koridor ekonomi tersebut mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional hingga sebesar 7% per tahun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan perekonomian nasional tidak bisa tumbuh tinggi tanpa dorongan dari sektor ekonomi daerah. "Bicara pertumbuhan berkualitas, itu harus inklusif dan berkeadilan," katanya, belum lama ini.

Dengan koridor ekonomi itu, imbuhnya, pendapatan regional domestik bruto (PRDB) diperkirakan meningkat hingga empat kali lipat yakni dari US\$555 miliar pada 2010 menjadi US\$1,09 triliun pada 2015 dan US\$2,16 triliun pada 2030.

Selain pembangunan koridor ekonomi, lanjut Armida, pemerintah juga berupaya membangun keterhubungan antardaerah.

## KETAHANAN

**PANGAN:** Sejumlah pekerja membongkar muatan beras Bulog di Medan, Sumatera Utara, Senin. Ekonom Indef Henny Sri Hartati menilai Indonesia saat ini tidak memiliki sistem stok penyangga ketahanan pangan yang memadai.



BISNIS/ANDI RAMBE

## Deflasi makanan 'dinginkan' Februari

BI Rate diperkirakan naik guna redam inflasi

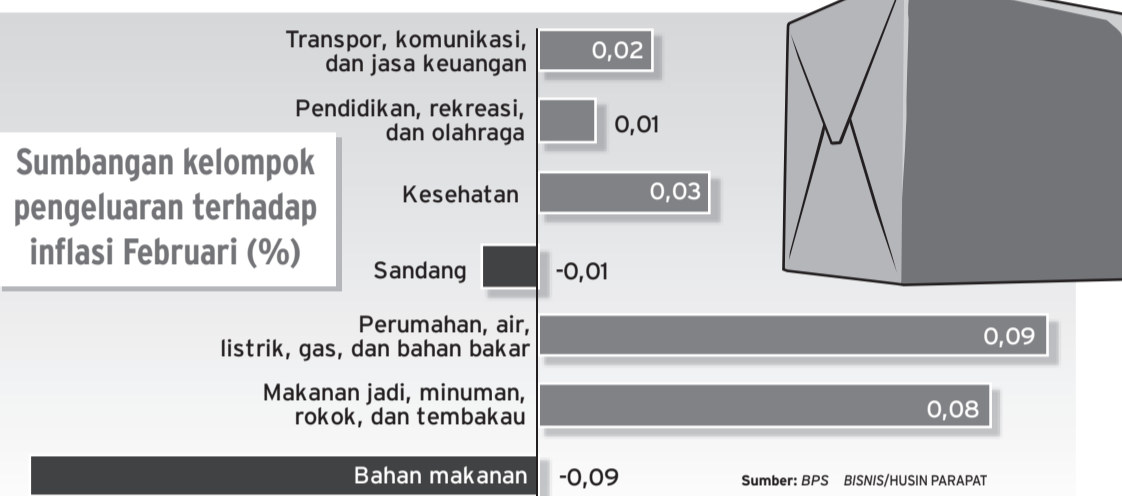
OLEH AGUST SUPRIADI  
& MARIA BENYAMIN  
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Setelah sempat memanaskan angka inflasi pada Januari, kelompok bahan makanan justru mencatatkan deflasi pada Februari. Perkembangan itu merupakan yang pertama kalinya dalam 4 tahun terakhir.

Deflasi pada kelompok bahan makanan mengendurkan tekanan inflasi pada bulan kedua tahun ini, sehingga kenaikan indeks harga konsumen pada Februari hanya 0,13%. Realisasi inflasi tersebut lebih rendah dari perkiraan pemerintah dan sejumlah ekonom.

Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan angka inflasi Februari 0,13% itu menyebabkan inflasi tahun kalender (Januari-Februari) menjadi 1,03%, sedangkan inflasi tahunannya (year-on-year/yooy) menurun menjadi 6,84% lebih rendah dari posisi Januari 7,02%.

"Baru pertama kali terjadi deflasi [-0,09%] pada kelompok bahan makanan dalam 4 tahun terakhir. Biasanya kelompok bahan makanan mengalami inflasi lebih tinggi daripada inflasi umum," kata Rusman di Jakarta, kemarin.



Teakan harga bahan makanan cenderung mengendur terhadap inflasi menyusul panen yang telah terjadi di beberapa daerah dan buah dari kebijakan pembebasan bea masuk atas impor beras selama Januari hingga Maret.

Bambang P.S. Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), pada awal pekan ini memperkirakan inflasi Februari di kisaran 0,2%-0,4%. Adapun seluruh ekonom yang dihubungi *Bisnis* memprediksi inflasi bulan lalu 0,25%-0,4%.

Ekonom Bank Danamon Helmy Arman misalnya memperkirakan inflasi Februari 0,25%. Adapun Citi Investment Research & Analisis dalam *Indonesia Macro Flash*, 1 Maret memperkirakan inflasi

sekitar 0,4%.

Namun, khusus untuk inflasi inti tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi umum sebesar 0,31% (*month-to-month*) atau 4,36% (*yooy*). Kepala BPS itu menjelaskan untuk pertama kali inflasi inti lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi umum.

Dia mengharapkan fokus utama pengendalian inflasi sebaiknya diarahkan ke inflasi inti dari pada inflasi karena harga bergejolak dan harga-harga yang diatur pemerintah. "Kecenderungan sepanjang tahun, inflasi inti akan begini saja sekitar 4%," katanya.

Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ikhsan menuturkan inflasi inti yang tercatat sebesar 0,31% dan secara tahunan 4,36%

harus diperhatikan. "Inflasi inti naik karena ada kenaikan di biaya transportasi. Itulah mengapa untuk mengantisipasi inflasi perlu ada kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia," ujarnya, kemarin.

Dia memperkirakan BI Rate masih akan mengalami kenaikan satu hingga dua kali pada paruh pertama tahun ini dengan rata-rata pada pengujung semester I/2011 sekitar 7,5%.

Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi instrumen moneter paling tepat untuk bisa menjaga inflasi inti di level yang rendah.

"Kalau BI Rate naik, otomatis nilai tukar rupiah akan menguat sehingga *imported inflation* bisa diredam. Kebijakan tersebut sekaligus menjaga ekspektasi inflasi

terkendali," katanya.

## Tren naik

Ekonom dari Sustainable Development Indonesia Dradjad Hari Wibowo mengharapkan pengambil kebijakan mewaspadai laju inflasi beberapa bulan ke depan yang diperkirakan tidak serendah inflasi pada Februari.

"Tekanan inflasi Maret dan beberapa bulan ke depan rasa-rasanya masih cukup tinggi," katanya.

Dia menjelaskan tiga alasan yang menyebabkan tren inflasi cenderung tinggi ke depannya yakni *pertama*, produksi beras dan pangan masih belum bisa diyakini seberapa besar untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

"Prognosis Kementan sering meleset dan risiko gagal panen karena cuaca masih tinggi di beberapa lumbung produksi seperti jalur pantura Jawa," jelasnya.

*Kedua*, gejala krisis politik di Timur Tengah dan Afrika Utara membuat harga minyak, bahan pangan dan energi global melonjak drastis.

*Ketiga*, adanya efek *inflatoir* dari kenaikan suku bunga BI Rate yang akan terasa pada beberapa bulan ke depan. Pada kesempatan itu, BPS memperkirakan pada Maret terjadi inflasi yang rendah berdasarkan *track record* pada bulan ini terjadi deflasi. (14/LUTFI ZAENUDDIN) (agust.supriadi@bisnis.co.id/maria.benyamin@bisnis.co.id)



BISNIS/YAYUS YUSUWOPRIHANTO

**PEMBATASAN BBM DITUNDA:** Seorang petugas melayani pengisian premium di sebuah SPBU di Jakarta, belum lama ini. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dampak penundaan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi di Jabodetabek terhadap APBN.

## Pembatasan konsumsi BBM rampung 2013

OLEH AHMAD ARIS  
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemerintah akan memberlakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi di lima pulau besar secara bertahap paling lambat pada 2013.

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Endah Murningsyah mengungkapkan kebijakan pembatasan tersebut dilakukan untuk mengurangi alokasi subsidi BBM yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

"Pembatasan akan dilakukan secara bertahap hingga 2013. Apakah sesuai jadwal? Ya tergantung pemberlakuan tahap pertamanya, kalau mundur berarti ya mundur juga," katanya di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan rencana awal penerapan kebijakan tahap pertama akan dilakukan mulai April 2011 untuk wilayah Jabodetabek. Kemudian seluruh Jawa dan Bali akan diberlakukan mulai Juli.

"Sumatra khusus untuk kota besarnya Oktober 2011, baru seluruh Sumatera pada Januari 2012," tuturnya.

Adapun untuk Kalimantan, khusus kota besarnya akan diberlakukan pembatasan konsumsi mulai Januari 2012 dan seluruh pulau itu mulai Juli 2012.

Sementara itu, khusus kota besar di Sulawesi mulai diberlakukan pada Januari 2013 dan seluruh pulau itu mulai Juli 2013.

"Kalau untuk pulau lainnya seperti Maluku dan Papua, tidak akan diberlakukan pembatasan," tambahnya.

**Kesiapan daerah**  
Pemerintah mengimbau kepada pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mempersiapkan infrastruktur pendukungnya yakni tangki pertamax.

"Pemerintah *nggak* bisa *maksa*, ini semacam pilihan investasi bagi pengusaha SPBU," ujarnya.

Endah melanjutkan pemerintah akan mengencakan sosialisasi kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tersebut terkait dengan kesiapan daerah dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Di tempat terpisah, Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengakui pemerintah menghadapi kondisi yang dilematis dalam permasalahan gejolak harga minyak dunia.

"Apakah menaikkan harga BBM atau membe-

## Ekspor Januari tertolong kenaikan harga komoditas

OLEH MARIA Y. BENYAMIN  
& AGUST SUPRIADI  
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Penguatan harga sejumlah komoditas bahan baku di pasar internasional membuat nilai ekspor Indonesia pada Januari meningkat 24,65% menjadi US\$14,46 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Meski demikian, jika dibandingkan dengan realisasi pada Desember 2010 nilai ekspor pada bulan lalu melemah 14,11%. Nilai ekspor migas pada Januari mencapai US\$2,52 miliar dan nonmigas US\$11,94 miliar.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan harga sejumlah komoditas mengalami perkembangan

yang cukup signifikan dibandingkan dengan realisasi pada bulan yang sama tahun lalu.

"Namun, ekspor kita masih dibantu oleh kenaikan harga yang memang terjadi," katanya di Jakarta, kemarin.

Dia menyebutkan beberapa komoditas yang mencatat kenaikan harga di pasar dunia di antaranya batu bara yang pertumbuhan pada Januari tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu di atas 50%.

Pada Januari 2010, harga batu bara tercatat sebesar US\$97 per ton, sedangkan pada bulan pertama tahun ini melonjak menjadi US\$137 per ton. Harga minyak sawit mentah (*crude palm oil*/CPO) juga meningkat dari US\$793 per ton pada

Januari 2010 menjadi US\$1.246 per ton pada awal tahun ini.

Perbaikan harga juga dialami karet dari semula US\$335,1 per ton meningkat menjadi US\$580,9 per ton, sedangkan harga nikel mencapai US\$25.646 per ton pada Januari dari US\$18.439 per ton pada bulan yang sama tahun lalu.

"Ini tidak merupakan kejutan bahwa ekspor Januari lebih rendah dari Desember. Ini sudah pola umum. Ekspor Januari selalu lebih rendah dari Desember. Yang penting dibandingkan dengan Januari 2010, ada kenaikan yang cukup tinggi," kata Rusman.

Fauzi Ikhsan, ekonom Standard Chartered Bank, menilai penurunan ekspor pada Januari merupakan siklus yang biasa terjadi di awal tahun. Hal ini terjadi karena

biasanya pada Desember kegiatan ekspor meningkat karena banyak pembelian, sehingga pada awal tahun relatif melandai.

"Kalau apresiasi rupiah pengaruhnya kecil ya terhadap ekspor, dibandingkan dengan kenaikan harga-harga komoditas yang melonjak tajam. Harga komoditas naik dua kali lipat, seperti harga minyak dari tadinya US\$35 per barel sekarang tembus US\$100 per barel. sedangkan Indonesia lebih banyak ekspor komoditas," ujarnya.

## Impor menguat

Meski demikian, laju pertumbuhan impor Indonesia pada Januari tahun ini masih lebih kencang dibandingkan dengan ekspor.

Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik, impor Januari mencapai US\$12,55 miliar atau naik 32,22% dibandingkan dengan Januari 2010. Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, impor Januari mencatat penurunan 4,55%.

Nilai impor itu terdiri dari impor migas sebesar US\$2,97 miliar dan impor nonmigas sebesar US\$9,58 miliar. Kondisi itu menyebabkan Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar US\$1,91 miliar.

Data BPS menunjukkan perdagangan migas mencatat defisit sebesar US\$453,6 miliar sementara perdagangan nonmigas mencatat surplus US\$2,35 miliar. "Kontribusi surplus terbesar dari perdagangan nonmigas. Untuk migas, kita defisit," tuturnya.